



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADANG SOMANTRI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **185816**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.440.863.423

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/36 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 235.944.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/73 m² di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 553.528.000
3. Bangunan Seluas 28 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 383.254.423
4. Tanah Seluas 1659 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 403.137.000
5. Tanah Seluas 128 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 128 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Bangunan Seluas 21.18 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 423.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, WARISAN Rp. 7.500.000
2. MOBIL, HONDA BRIO E SATYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000



3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINI BUS Tahun 2018, WARISAN Rp.
290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 139.070.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.113.211.118

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.116.645.041

III. HUTANG Rp. 253.493.335

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.863.151.706

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.